

LAPORAN AKHIR
Pengenalan Lapangan Persekolahan II
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI SMA ASSHOMADIYAH



Disusun Oleh :
Badrus Soleh
2023311007

PROGAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (STKIP) PGRI BANGKALAN
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan II Oleh :


Nama : Badrus Soleh

NIM : 2023311007

Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 16 September 2023

Dosen Pembimbing Lapangan



Dian Eka Indriani, SE., M.Pd.

NIDN. 0706037905

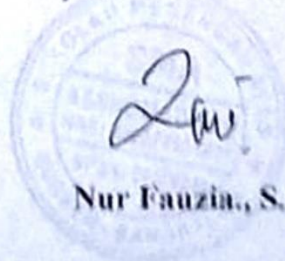
Guru Pamong



Hendra Kurniawan, S.Pd

Mengetahui,

Kepala SMA Asshomadiiyah



Nur Fauzia., S.Sos.I.

KATA PENGANTAR

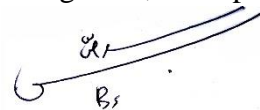
Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan PLP 2 di SMA Asshomadiyah Burneh, dengan tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi syarat Program magang yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan.

Dalam menyelesaikan laporan ini penulis banyak mengalami kesulitan terutama dalam hal tenaga, waktu dan peralatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta bimbingan, seperti:

1. Bapak Fajar Hidayatullah, M.Pd selaku Ketua STKIP PGRI Bangkalan.
2. Ibu Dr. Siti Maria Ulfa, M.Pd selaku DPL PLP II STKIP PGRI Bangkalan.
3. KH. Abdullah Muad Makky selaku Ketua Yayasan Pesantren Asshomadiyah Burneh.
4. Nur Fauzia, S.sos.I selaku Kepala SMA Asshomadiyah Burneh.
5. Bapak Hendra kurniawan, S.Pd selaku guru pamong mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PLP 2 SMA Asshomadiyah Burneh.
6. Ibu/Bapak guru beserta jajarannya dan peserta didik SMA Asshomadiyah Burneh yang telah ikut berpartisipasi.
7. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Bangkalan, 16 September 2023



Badrus Soleh

2023311007

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang PLP II	1
B.Tujuan PLP II	2
C.Manfaat	3
BAB II PENYAJIAN LAPORAN KEGIATAN	4
A.Persiapan Pelaksanaan Program	4
a.Pembelajaran Microteaching.....	4
b.Pembekalan PLP II	5
c.Kalender Pendidikan	5
d.Rencana Pekan Aktif	5
e.Program Tahunan	6
f.Program Semester.....	6
g.Silabus.....	6
h.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	6
B.Pelaksanaan Program.....	7
a.Persiapan Sebelum Mengajar.....	7
b.Pembuatan RPP	7
c.Praktik Mengajar.....	8
C.Hasil Pelaksanaan Program	9
a.Faktor Pendukung	9
b.Faktor Penghambat	11
c.Upaya Mengatasi.....	13
BAB III PENUTUP	15
A.Kesimpulan.....	15
B.Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Langkah-langkah Pembuatan RPP.....	8
Tabel 3 Praktik mengajar.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PLP II

Ilmu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi tujuan bagi setiap orang dalam pencapaian ilmu pengetahuan. Metode atau strategi mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara mempraktikkan atau menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dijenjang pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendidik dan menjadi bekal hidup bagi tunas-tunas bangsa yang sedang berkembang.

Perguruan tinggi sebagai salah satu tempat pendidikan yang menyediakan dan membentuk calon-calon penerus bangsa, turut andil dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. STKIP PGRI Bangkalan yang bergerak mempersiapkan calon tenaga pendidik atau pengajar secara terarah, sistematis, dalam suatu jangka waktu tertentu agar di kemudian hari bisa menggunakan semua ilmu yang sudah didapat untuk menjadi tenaga pengajar atau pendidik yang profesional dan bermutu dalam bersaing di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, setiap Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan II di sekolah-sekolah yang telah dipersiapkan.

Program Pengenalan Lapangan Persekolahan II merupakan salah satu program kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP PGRI Bangkalan, sebagai bagian dari mata kuliah dalam kurikulum yang dilakukan mahasiswa untuk terjun langsung kelapangan sebagai asistensi guru di sekolah mitra dari STKIP PGRI Bangkalan. Kegiatan PLP II ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Program PLP II memiliki bobot 3 SKS, yang dilaksanakan di sekolah. Proses pelaksanaan PLP II dilaksanakan kurang lebih 30 hari yaitu dimulai dari tanggal 22 Agustus 2023 sampai 16 September 2023. Program Pembimbing dari kegiatan ini dilakukan oleh Dosen Koordinator Lapangan (DKL), Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong

di sekolah SMA Asshomadiyah yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan.

SMA Asshomadiyah Burneh merupakan sebuah sekolah menengah atas berbasis pondok pesantren yang beralamat lengkap di Jl. KH Makky Syarbini No.107 Desa Morlorong , Kec. Burneh, Kab. Bangkalan Provinsi Jawa Timur. SMA Asshomadiyah di dirikan oleh Bapak Saiful Rohman pada tahun 2009 dan beliau menjabat sebagai kepala sekolah pertama dan berakhir pada tahun 2019. Pada tahun 2019 kepala SMA Asshomadiyah digantikan oleh putrinya yaitu ibu Nur fauzia, S. Sos.I., sampai saat ini. Program Pengenalan lapangan persekolahan II SMA Asshomadiyah di lakukan secara luring.

Program Pengenalan Lapangan Persekolahan II SMA Asshomadiyah dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat menerapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang telah dimiliki. Mahasiswa bertugas untuk membantu guru pamong dalam mengajar dan melakukan praktik mengajar secara daring dengan terbimbing dan terstruktur. Oleh karena itu, kegiatan PLP II ini perlu diikuti oleh seluruh mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan agar dapat mengasah kemampuan mengajarnya dan menambah pengalaman mengajar sebelum terjun ke dunia kependidikan yang akan ditekuni nantinya.

B. Tujuan PLP II

1. Tujuan Umum

Pengenalan lapangan persekolah (PLP) II bertujuan agar mahasiswa program sarjana pendidikan mendapatkan pengalaman kependidikan secara faktual dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi, kepribadian, sosial dan penguasaan materi bidang studi secara utuh, yang bermuara pada pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang professional dan berkarakter, serta mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan penuh tanggung jawab.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari dilaksanakannya pengenalan lapangan persekolah di SMA Assohomadiyah adalah untuk melatih mahasiswa agar mengembangkan kemandirian sebagai guru sehingga merasa yakin untuk kegiatan pembelajaran serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang anak didik dan kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan pengolahan kegiatan pembelajaran.

C. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari program pengenalan lapangan persekolahan (PLP) II antara lain :

1. Mahasiswa dapat mengenal lebih dalam tentang SMA Asshomadiyah.
2. Mahasiswa mengetahui proses kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran di sekolah serta berbagai masalah yang mungkin timbul dan bagaimana pemecahannya.
3. Mahasiswa mengetahui perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran dan model-model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.
4. Mahasiswa dapat menambah bekal materi yang akan dilaksanakan pada pengenalan lapangan persekolah (PLP) II.

BAB II

PENYAJIAN LAPORAN KEGIATAN

A. Persiapan Pelaksanaan Program

a. Pembelajaran Microteaching

Kehadiran pembelajaran mikro (microteaching) dalam program kurikulum pendidikan keguruan sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 1963. Walaupun sudah cukup lama, kehadiran pembelajaran mikro dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi dalam upaya mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan (kompetensi) guru dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Sebelum muncul pendekatan pembelajaran mikro, setiap mahasiswa calon guru yang telah menyelesaikan program perkuliahan yang bersifat teori, untuk memberikan pengalaman praktis mereka langsung diterjunkan ke sekolah tempat latihan untuk melakukan praktek mengajar, atau yang sering disebut dengan Program Pengalaman Lapangan (PLP) Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan cepat, dan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut banyak berdampak pada tuntutan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk terhadap tuntutan profesionalisme para guru. Untuk merespon tuntutan tersebut, upaya-upaya inovasi dalam program penyiapan calon guru terus menerus diupayakan, dengan tujuan agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.

Sebelum munculnya pembelajaran mikro, para calon guru yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah keguruan dan bidang studi yang harus dikuasainya, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pengalaman praktis mengajar, yaitu dengan mengikuti kegiatan praktek di sekolah tempat latihan melalui Program Pengalaman Lapangan (PLP). Ketika menempuh PLP setiap mahasiswa langsung mengajar di kelas yang sebenarnya, melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara utuh (real teaching on the real class room teaching). Mereka (mahasiswa calon guru) langsung tampil di dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran, berhadapan dengan siswa

yang berjumlah rata-rata antara 30-35 orang siswa, menyampaikan materi pembelajaran secara utuh dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang mereka kuasai.

b. Pembekalan PLP II

Pengenalan Lapangan Persekolahan II (PLP II) adalah tahapan terakhir dalam Pengenalan Lapangan Persekolahan Program Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan pada semester VI, sebagai tahap lanjutan dari PLP I dan Microteaching. PLP II dimaksudkan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah STKIP PGRI Bangkalan melaksanakan pembekalan pengenalan lapangan persekolahan (PLP II) semester genap tahun akademik 2023/2024 yang bertempat di lantai 2 graha stkip pgri bangkalan kegiatan ini berlangsung pada hari Jum'at 11 Agustus 2023.

c. Kalender Pendidikan (Terlampir)

Kalender pendidikan (Kaldik) merupakan suatu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran siswa selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan dirancang untuk mempermudah guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas selama satu tahun. Perancangan kalender pendidikan juga untuk menjadikan seluruh indikator dari kompetensi dasar agar terlaksana sesuai waktu efektif pembelajaran selama satu tahun.

d. Rencana Pekan Aktif (Terlampir)

Rencana Pekan Aktif (RPA) adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk Menyusun RPA yang harus di perhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu/pekan efektif.

e. Program Tahunan (Terlampir)

Program Tahunan (Prota) adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (SK/KI, dan KD) yang telah ditetapkan. Program tahunan tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun.

f. Program Semester (Terlampir)

Program semester (Promes) adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasa yang ada dalam semester tersebut dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan.

g. Silabus (Terlampir)

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalamnya mencakup standar kompetensi/kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok/ pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Dengan adanya silabus guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan dalam penyusunan RPP, program tahunan dan program semester.

h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Terlampir)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (KD). Dengan kata lain, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan suatu rangkaian dari skenario kegiatan yang ingin dan akan dilakukan oleh guru. Setiap ada proses pembelajaran maka guru mengajar sesuai pedoman RPP yang telah di buat. Sehingga ketika mengajar tidak mengurangi dan melebihi waktu pembelajaran.

B. Pelaksanaan Program

a. Persiapan Sebelum Mengajar

Persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui oleh guru dalam pembelajaran. Pada tahap ini guru mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembelajaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila penyampaian dari bahan pembelajaran sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sangat perlu disiapkan untuk mempermudah guru dalam mengajar. Maksudnya, dari setiap bagian-bagian perangkat pembelajaran memiliki kegunaan masing-masing agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan maksimal. Jadi persiapan sebelum mengajar mahasiswa perlu mempersiapkan materi dan bahan ajar terlebih dahulu agar kita mengetahui materi apa yang akan kita pelajari pada peserta didik, lalu selanjutnya kita mempersiapkan apa saja tujuan kita dalam KBM kepada peserta didik lalu kita sebagai pendidik juga harus meningkatkan minat belajar terhadap siswa agar selalu bersemangat dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Lalu yang terakhir strategi apa yang akan kita gunakan saat pembelajaran berlangsung guna untuk membuat pembelajaran menjadi lebih asyik dan menaikkan motivasi belajar siswa. Karena sering sekali terjadi siswa bosan dan kelas menjadi tidak kondusif, oleh karena itu sangat penting mempersiapkan strategi sebelum mengajar di dalam kelas.

b. Pembuatan RPP

Pembuatan RPP kami lakukan setelah konsultasi dengan guru pembimbing (guru pamong), kemudian kami mengikuti aturan pembuatan RPP sesuai dengan kurikulum sekolah SMA Asshomadiyah yaitu kurikulum 2013. Berikut langkah-langkah pembuatan RPP dari kelompok kami:

No	Langkah-langkah
-----------	------------------------

1.	Mengkaji silabus.
2.	Mengidentifikasi materi pembelajaran.
3.	Menentukan tujuan.
4.	Mengembangkan kegiatan Pembelajaran.
5.	Penjabaran jenis penilaian.
6.	Menentukan alokasi waktu.
7.	Menentukan sumber belajar.

Table 2 langkah-langkah pembuatan RPP

c. Praktik Mengajar

Praktik mengajar adalah pelaksanaan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dimana mahasiswa sebagai calon pendidik ikut langsung dalam proses belajar mengajar. Praktik mengajar yang dilakukan adalah praktik mengajar terbimbing, mahasiswa mengajar langsung sebagai guru kelas dengan didampingi oleh guru pamong. Praktik mengajar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa sebagai calon pendidik untuk menerapkan keterampilan dan kemampuan untuk menyampaikan materi. Kegiatan yang dilakukan selama praktik mengajar adalah, antara lain :

No.	Kegiatan
1	<p>Pendahuluan</p> <p>Mahasiswa masuk kedalam kelas dan memulai kelas dengan memberikan salam, lalu memperkenalkan diri, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan materi yang akan dipelajari, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari.</p>
2	<p>Kegiatan Inti</p> <p>Pada kegiatan inti ini mahasiswa memberikan penjelasan materi yang tidak lupa juga membuat pembelajaran semenarik mungkin agar siswa tidak bosan dengan berkomunikasi/diskusi dengan siswa dengan pertanyaan pertanyaan yang terkait pada materi. Selanjutnya menanyakan perasaan siswa selama pemaparan</p>

	materi serta menanyakan apakah sudah dimengerti atau tidak.
3	Penutup Sebelum menutup pembelajaran mahasiswa memberikan umpan balik serta memberikan refleksi. Selanjutnya memberikan salam sebagai akhir pembelajaran.

Tabel 3 praktik mengajar

d. Umpan Balik dari Guru Pamong

Umpan balik dari guru pamong kepada mahasiswa merupakan tindakan atau informasi yang diberikan oleh guru guna memberikan informasi terhadap kinerja maupun pemahaman mahasiswa. Pemberian informasi yang diberikan berupa kesenjangan tentang hal yang harus telah dan akan dipahami serta langkah yang harus diambil selanjutnya. Guru pamong atau guru mata pelajaran yang ada di SMA Asshomadiyah khususnya guru guru pamong yang menjadi pembimbing kami para anggota PLP II, sangat mengayomi, dan baik sekali, awal memulai PLP II kami di dampingi terlebih dahulu, lalu kami di beritahu cara mengajar yang lebih baik, agar semua siswa tidak bosan, dan guru pamong di SMA Asshomadiyah juga mempunyai respon yang sangat baik, saat kita selalu bertanya guru pamong kami masing masing masih mengayomi dan merespon dengan baik.

C. Hasil Pelaksanaan Program

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan menjadikan tercapainya keberhasilan pada suatu pembelajaran. Tanpa adanya faktor pendukung mahasiswa PLP II akan kesulitan untuk mencapai pembelajaran sesuai dengan target yang diinginkan. Perlu diketahui apa saja faktor pendukung dari Sekolah Menengah Atas Asshomadiyah diantaranya :

1. Respon Peserta didik

Respon Peserta didik merupakan reaksi sosial yang dilakukan siswa atau pelajar dalam menanggapi pengaruh atau rangsangan dalam dirinya dari situasi pengulangan yang dilakukan oleh guru. Respon Peserta didik di sini akan menyebabkan faktor pendukung bagi mahasiswa PLP II di SMA Asshomadiyah. Dapat dilihat dari bagaimana respon peserta didik di dalam kelas. Dari hasil pelaksanaan pembelajaran PLP II, dapat diketahui bahwa respon peserta didik sangatlah aktif dan kondusif. Mereka merespon dengan antusias walaupun kurang minatnya terhadap suatu mata pelajaran, mereka juga aktif dalam menanyakan apa yang mereka belum pahami dari mata pelajaran tersebut.

2. Fasilitas Media Pembelajaran

Fasilitas Media Pembelajaran adalah alat untuk bahan ajar yang memudahkan penyampaian suatu materi dalam mengajar. Media pembelajaran di SMA Asshomadiyah sangatlah mendukung mahasiswa PLP 2 untuk lebih bersemangat mengajar, hal ini disebabkan oleh lengkapnya media pembelajaran seperti buku yang sudah di sediakan oleh guru pamong, proyektor dan stop kontak yang sudah disediakan oleh sekolah, dan lainnya. Mulai dari buku yang merupakan bahan bahan ajar, mahasiswa hanya perlu belajar sesuai dengan topic pembelajaran dan mempersiapkan konsep mengajar yang bagus. Kemudian jika mahasiswa ingin mengajar.

3. Fasilitas Belajar Mengajar

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, dan meja belajar yang tertata dengan rapi didalam ruang kelas sekolah SMA Asshomadiyah sehingga siswa senang dan nyaman untuk melakukan proses belajar pembelajaran

b. Faktor Penghambat

Mengenali Faktor Penghambat dalam proses pembelajaran di SMA Asshomadiyah. Pembelajaran dalam kelas merupakan faktor dasar dalam membina, mengembangkan, dan mengajari peserta didik. Selama proses pembelajaran di SMA Asshomadiyah Burneh Bangkalan, Mahasiswa PLP II STIKP PGRI Bangkalan pasti akan menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi. Masalah-masalah tersebut dapat menjadi faktor penghambat belajar, sehingga peserta didik tidak nyaman berada di kelas dan tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah kegagalan dalam kegiatan pembelajaran.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses pembelajaran :

1. Respon Peserta Didik

Faktor Respon Peserta didik, sikap merupakan reaksi atau respon terhadap objek orang, barang, dan sebagainya baik secara positif maupun negatif. Pada faktor ini mahasiswa PLP II dapat melihat masalah yang terjadi berdasarkan respon peserta didik di dalam kelas. Ada beberapa peserta didik yang tidak merespon ketika mahasiswa sedang mengisi kelas, seperti contoh :

- a. Peserta didik tidur saat mahasiswa mengajar, hal ini bisa dimaklumi karena peserta didik SMA Asshomadiyah tinggal di pondok. Jadi, waktu tidur mereka terbatas sehingga merasa mengantuk ketika belajar.
- b. Kurang minatnya peserta didik pada suatu mata pelajaran, dalam proses pembelajaran sebagian peserta didik SMA Asshomadiyah tidak minat pada suatu mata pelajaran. Misalnya pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika, hal tersebut sering terjadi karena pada umumnya 70% dari seluruh siswa/i di Bangkalan beranggapan bahwa kedua mata pelajaran tersebut sangatlah sulit dipelajari dan dipahami atau bahkan tidak disukai. Sehingga peserta didik di SMA

Asshomadiyah kebanyakan dari mereka terutama pada kelas putera tidak menanggapi/mendengar/memahami penjelasan materi dari mahasiswa PLP 2 dengan baik. Dan peserta didik cenderung untuk menyepelkan bahkan sibuk dengan kegiatannya sendiri.

2. Kedisiplinan waktu

Faktor kedisiplinan waktu pada peserta didik, disiplin waktu mempunyai arti dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik SMA Asshomadiyah harus mengikuti aturan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Khususnya pada saat peserta didik masuk kelas dengan tepat waktu, namun tidak disangka bahwa ada beberapa peserta didik di SMA Asshomadiyah yang masih sering terlambat. Waktu keterlambatan mereka dapat diperkirakan selama 10 - 15 menit. Faktor ini akan menjadi penghambat bagi mahasiswa PLP II yang sedang mengajar karena ketika peserta didik datang terlambat, mereka akan ketinggalan penjelasan dari mahasiswa dan mahasiswapun akan terganggu jika penjelasan materi terpotong disebabkan oleh peserta didik yang datang terlambat. Selain faktor kedisiplinan waktu pada peserta didik, adapun faktor kedisiplinan waktu mengajar yang terpotong. Faktor ini terjadi pada mahasiswa PLP II ketika melaksanakan praktek olahraga. Waktu pelaksanaan praktek olahraga kurang maksimal, karena pada saat jam praktek, ada peserta didik yang masih melaksanakan sholat duha. Sehingga waktu pelaksanaan olahraga terpotong dan mengakibatkan pelaksanaan tersebut kurang maksimal. Terpotongnya waktu praktek sekitar 10 - 30 menit. Tidak hanya terpotong peserta didik yang sholat, bahkan terpotong oleh kehadiran peserta didik yang hanya sedikit. Hampir separuh dari peserta didik yang terlambat sehingga memakan waktu pelaksanaan praktek olahraga. Pelaksanaan praktek olahraga dimulai dari jam 06.00 - 07.45. Jika terpotong

waktu 30 menit maka mahasiswa PLP II hanya menggunakan waktu 75 menit dalam melaksanakan praktek mengajar.

3. Pelanggaran Tata Tertib Dalam Berpakaian

Jika dikaitkan dengan pakaian, maka disiplin berpakaian adalah suatu sikap dan perilaku individu dalam mematuhi norma dan etika dalam berpakaian. Sudah seharusnya peserta didik SMA Asshomadiyah memakai pakaian sesuai dengan jadwal dan sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Dalam faktor pakaian, juga bisa menjadi menghambat bagi mahasiswa PLP II ketika proses kegiatan mengajar, khususnya pada saat kegiatan mengajar praktek olahraga, hal ini disebabkan oleh peserta didik yang tidak memakai pakaian sesuai dengan mata pelajarannya yaitu pakaian olahraga. Jika peserta didik tidak memakai pakai olahraga, maka mahasiswa PLP II akan kesulitan untuk mengajari mereka, karena olahraga merupakan semua bentuk aktivitas fisik. Aktifitas fisik ini bersifat praktek, praktek berupa pemanasan, berlari, bermain bola dan lain sebagainya. peserta didik harus mampu mempraktekkan olahraga. Jika mereka tidak memakai pakaian olahraga, maka mereka juga akan kesulitan untuk mempraktekkannya. Khususnya peserta didik putri yang sangat sekali kesulitan dalam mengikuti kegiatan praktek olahraga karena mereka tidak memakai pakaian olahraga, mereka menggunakan kostum seragam pramuka dimana bawahannya adalah rok. Hal ini bisa menyebabkan faktor penghambat mahasiswa PLP II untuk melaksanakan kegiatan praktek olahraga dan pencapaiannya tidak maksimal.

c. Upaya Mengatasi

1. Untuk respon peserta didik, upaya mengatasinya adalah mencoba menyusun dan mencari analogi-analogi dari materi-materi yang diajarkan di di dunia nyata sehingga materi menjadi lebih menarik untuk dipelajari bagi siswa. Selain itu, ketika kegiatan belajar dan

mengajar berlangsung peserta didik juga perlu diperhatikan secara menyeluruh guna pembelajaran menjadi lebih efektif.

2. Untuk mengatasi kedisiplinan waktu adalah mahasiswa yang melaksanakan PLP II tetap masuk tepat waktu dan melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang telah dahulu berada di dalam kelas, sehingga materi dapat tersampaikan dengan kurun waktu yang tepat. Dan bagi peserta didik yang terlambat, diperkenankan untuk masuk setelah mendapatkan sanksi dari pengajar.
3. Untuk mengatasi pelanggaran tata tertib dalam berpakaian yaitu dengan cara menegur siswa yang melakukan pelanggaran, jika tetap melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi dari guru.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Pengenalan Lapangan Persekolahan II merupakan salah satu program kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, sebagai bagian dari mata kuliah dalam kurikulum yang dilakukan mahasiswa untuk terjun langsung kelapangan sebagai asistensi guru di sekolah mitra dari STKIP PGRI Bangkalan. Dimana proses pelaksanaan PLP II dilaksanakan kurang lebih 30 hari yaitu dimulai dari tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023. Program Pembimbing dari kegiatan ini dilakukan oleh Dosen Koordinator Lapangan (DKL), Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong di sekolah SMA Asshomadiyah Burneh yang merupakan sebuah Sekolah Menengah Atas berbasis pondok pesantren.

Program Pengenalan Lapangan Persekolahan II SMA Asshomadiyah dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat menerapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang telah dimiliki. Mahasiswa bertugas untuk membantu guru pamong dalam mengajar dan melakukan praktik mengajar secara daring dengan terbimbing dan terstruktur.

Dengan demikian, melalui kegiatan PLP II mahasiswa mendapatkan manfaat yang dapat dipelajari. Adapun manfaat tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mengenal lebih dalam tentang SMA Asshomadiyah.
2. Mahasiswa mengetahui proses kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran di sekolah serta berbagai masalah yang mungkin timbul dan bagaimana pemecahannya.
3. Mahasiswa mengetahui perangkat yang diperlukan dalam pembelajaran dan model-model pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.
4. Mahasiswa dapat menambah bekal materi yang akan dilaksanakan pada pengenalan lapangan persekolah (PLP) II

B. Saran

Setelah melaksanakan PLP II ini, kami dapat merasakan bagaimana hidup sebagai seorang tenaga profesional guru dalam lingkungan sekolah, oleh karena itu kami ingin menyarankan hal sebagai berikut :

1. Untuk Sesama Mahasiswa PLP II

Mahasiswa Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) harus mampu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa, guru, dan karyawan sekolah, tim UPPL, DPL, serta lebih meningkatkan disiplin dalam mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan dalam PLP.

2. Untuk Pihak Sekolah

Diharapkan pihak sekolah dapat meningkatkan dalam pemberian bimbingan, motivasi, dukungan serta evaluasi kepada mahasiswa PLP II agar semangat dalam proses pembelajaran serta hal-hal yang berhubungan dengan praktik di sekolah.

3. Untuk Pihak UPPL STKIP PGRI Bangkalan

Sebelum pelaksanaan PLP II sebaiknya mahasiswa diberikan sosialisasi PLP II yang terperinci mulai dari pembukaan, pembuatan laporan dan penutupan agar paham mengenai sistem yang digunakan pada saat PLP II tahun ini serta mengomunikasikan dengan baik kepada mahasiswa hal-hal yang harus dan akan dilaksanakan oleh mahasiswa sehingga tidak terjadi praduga yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku pedoman PLP II STKIP PGRI Bangkalan Tahun Akademik 2022/2023

RENCANA PEKAN AKTIF

Sekolah : SMA ASSHOMADIYAH
 Mata Pelajaran : PPKN
 Kelas/Semester : XI/ Ganjil

1. Jumlah minggu dalam semester 1

NO	Bulan	Jumlah Minggu
1	Juli	2
2	Agustus	4
3	September	4
4	Oktober	4
5	November	5
6	Desember	4
Jumlah		22

2. Jumlah minggu tidak efektif dalam semester 1

NO	Bulan	Jumlah Minggu	Bulan
1	Kegiatan Tengah Semester	1	September
2	Latihan Ulangan Semester 1	1	Oktober
3	Ulangan Semester 1	1	Desember
4	Persiapan Penerimaan Raport	1	Desember
5	Libur Semester 1	2	Desember
6	Libur 17 Agustus	1	Agustus
Jumlah		7	

3. Jumlah minggu efektif dalam semester 1

Jumlah minggu dalam semester 1 – Jumlah minggu tidak efektif dalam semester 1
 = 22 Minggu – 7 Minggu
 = 15 Minggu efektif

4. Jumlah Jam Per Semester 1

= 15 x 2 Jam Pelajaran = 30 Jam Pelajaran

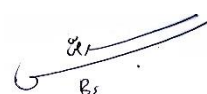
Guru Mata Pelajaran



Hendra kurniawan, S.Pd

Bangkalan, 16 September 2023

Mahasiswa PLP II



Badrus Soleh
 NPM. 2023311007

PROGRAM TAHUNAN

Mata Pelajaran	:	PPKn
Satuan Pendidikan	:	SMA ASSHOMADIYAH
Kelas / Semester	:	XI / Ganjil - Genap
Tahun Pelajaran	:	2023/2024

Komptensi Inti :

- a. **KI-1: Menghayati dan mengamalkan** ajaran agama yang dianutnya.
- b. **KI-2: Menghayati dan mengamalkan** perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- c. **KI 3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- d. **KI4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

SMT	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu
1	<p>1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa</p> <p>2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p>	12 JP
1	<p>1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2.2 Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	12 JP
1	<p>1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <p>3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	12 JP

SMT	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu
2	<p>1.4 Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	8 JP
2	<p>1.5 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	8 JP
2	<p>1.6 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>2.6 Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan</p>	16 JP

SMT	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu
	penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	

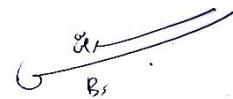
Bangkalan, 16 September 2023

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran



Hendra kurniawan, S.Pd

Mahasiswa PLP II



Badrus Soleh
NIM. 2023311007

LAMPIRAN 4

PROGRAM SEMESTER

Tahun Pelajaran : 2023/2024
Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XI / Ganjil
Alokasi Waktu : 2 Jam / Minggu

Materi Pokok / Kompetensi Dasar	Jml JP	JULI				Agustus					September				Oktober				November					Desember				Ket	
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila	12 JP	X	X	2	2	2	2	2	2																				
Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila	12 JP	X	X							2	2	2	2	2															
Sistem hukum dan peradilan di Indonesia	12 JP	X	X																										
Jumlah Jam Efektif	36 JP	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
Jumlah Jam Cadangan	6 JP	X	X																										
Jumlah Jam Total Semester Ganjil	42 JP	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															

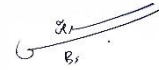
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran



Hendra kumiawan, S.Pd

Bangkalan, 16 September 2023

Mahasiswa PLP II



Badrus Soleh
NIM. 2023311007

PROGRAM SEMESTER

Tahun Pelajaran : 2023/2024
Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : XI / Genap
Alokasi Waktu : 2 Jam / Minggu

Materi Pokok / Kompetensi Dasar	Jml JP	Januari					Februari				Maret				April				Mei					Juni				Ket	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
Peran Indonesia dalam perdamaian dunia	8 JP	X	2	2	2	2																							
Kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	8 JP	X					2	2	2	2																			
Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa	16 JP	X									2																		
Jumlah Jam Efektif	32 JP	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2																		
Jumlah Jam Cadangan	6 JP	X																											
Jumlah Jam Total Semester Genap	38 JP	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2																		

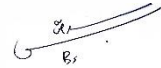
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran



Hendra kumiawan, S.Pd

Bangkalan, 16 September 2023

Mahasiswa PLP II



Badrus Soleh
NIM. 2023311007

LAMPIRAN 5

SILABUS

Mata Pelajaran : PPKn
 Kelas : XI (Sebelas)
 Semester : Ganjil dan Genap
 Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran / Minggu
 Kompetensi Inti :

- **KI-1: Menghayati dan mengamalkan** ajaran agama yang dianutnya.
- **KI-2: Menghayati dan mengamalkan** perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI 3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	• Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. a. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia	• Mengamati tayangan film/vidio dan atau membaca dari berbagai sumber dengan penuh rasa syukur tentang Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila
2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	• Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	b. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila c. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia d. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia	• Mengajukan pertanyaan dengan penuh kejujuran dan kedisiplinan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila
3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	• Memahami konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia • Memahami substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila • Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia • Menganalisis upaya penegakan Hak Asasi Manusia • Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara		• Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik dengan penuh kejujuran dan kedisiplinan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila • Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila • Mempresentasikan hasil analisis dengan penuh kedisiplinan tentang Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila
4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila	• Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan		

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	bernegara		
1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	• Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. a. Hakikat demokrasi b. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia c. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia	• Mengamati tayangan vidio/film/gambar. Membaca dari berbagai sumber dengan rasa tanggung jawab, mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang sistem dan dinamikademokrasi Pancasila. • Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung jawab tentang sistem dan dinamikademokrasi Pancasila • Menganalisis dan membandingkan sistem dan dinamikademokrasi Pancasila dalam berbagai kurun waktu. • Menyajikan hasil analisis tentang sistem dan dinamikademokrasi Pancasila
2.2 Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	• Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	• Memahami hakikat demokrasi • Memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia • Memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia • Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	• Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
1.3 Menyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	• Menyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	Sistem hukum dan peradilan di Indonesia a. Sistem hukum di Indonesia b. Mencermati sistem peradilan di Indonesia c. Menampil-kan sikap yang sesuai dengan hukum	• Mengamati tayangan vidio/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia • Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dari konsep sampai hipotesis secara pro aktif dan responsive tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia • Mengumpulkan data secara pro aktif dan responsive dari berbagai sumber tentang
2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia	• Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia		

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> Memahami sistem hukum di Indonesia Mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia Mendeskripsikan sikap yang sesuai dengan hukum Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 		<p>sistem hukum dan peradilan di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> Menganalisis dan menyimpulkan serta menyaji hasil analisis secara pro-aktif dan responsif tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia
4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 		
1.4 Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	<ul style="list-style-type: none"> Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 	Peran Indonesia dalam perdamaian dunia a. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional b. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara santun dan toleran dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia Menganalisis dan menyimpulkan serta menyaji hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia
2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	<ul style="list-style-type: none"> Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 		
3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional Memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 		
4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 		
Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
1.5 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 	Kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan a. Ancaman terhadap integrasi nasional b. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) dengan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung-jawab tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Menyajikan hasil analisis dengan melakukan debat terbuka secara bertanggung-jawab dan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 		
3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> Memahami ancaman terhadap integrasi nasional Menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 		
4.5 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 		
1.6 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 	Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa a. Makna persatuan dan kesatuan bangsa b. Kehidupan bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa
2.6 Bersikap proaktif dalam	<ul style="list-style-type: none"> Bersikap proaktif dalam menerapkan 		

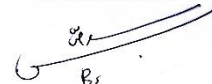
Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bekerja, menganalisis dan menyimpulkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa
3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Memahami makna persatuan dan kesatuan bangsa Memahami kehidupan bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjelaskan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia Mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> c. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia d. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 	
4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 		

Guru Mata Pelajaran



Hendra kurniawan,S.Pd

Bangkalan, 16 September 2023
Mahasiswa PLP II



NPM. 2023311007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA ASSHOMADIYAH

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI / Ganjil

Materi Pokok :

- a. Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
- b. Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila

Alokasi Waktu : 2 Jam pelajaran x 40 Menit / minggu

a. Kompetensi Inti

KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.

KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

b. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
<p>1.1. Mensyukuri Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>1.2. Menghayati Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan Demokrasi sebagai pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengabdikan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam bentuk mempelajari dengan sungguh-sungguh materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan Hak dan Kewajiban asasi manusia Serta penyelenggaraan Demokrasi • Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara
<p>2.1 Menunjukkan sikap toleransi sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengimplementasikan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia</p> <p>2.2. Menghargai perbedaan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mengimplementasikan Sistem Demokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan kerangka praktik penyelenggaraan HAM sebagai wujud mengamalkan nilai-nilai Pancasila • Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; • Menghayati dan menghargai nilai-nilai yang melekat dalam Hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
<p>3.1 Menganalisis Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam perspektif Pancasila</p> <p>3.2 Menganalisis Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan Konsep Hak dan Kewajiban asasi manusia • Mengidentifikasi Subtansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila • Mengidentifikasi kasus pelanggaran Hak Asasi manusia • Menunjukkan upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) • Mengetahui Hakikat Demokrasi • Menjelaskan Dinamika penerapan demokrasi Pancasila • Menunjukkan upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia
<p>4.1. Mewujudkan Harmonisasi hak dan kewajiban asasi Manusia sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik berbangsa dan bernegara</p> <p>4.2. Mewujudkan Sistem Demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik berbangsa dan bernegara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan HAM dan Demokrasi • Memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan HAM dan Demokrasi • Mempresentasikan hasil verifikasi data tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan HAM dan Demokrasi

c. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

1. Peserta didik dapat Mendeskripsikan Hak asasi manusia dengan baik dan benar
2. Peserta didik dapat Mengidentifikasi sistem Demokrasi Negara republic indonesia dengan baik dan benar
3. Peserta didik dapat Menunjukkan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah dengan baik dan benar

d. Materi pembelajaran

A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia

1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila

a. Makna hak asasi manusia

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna:

1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia.

2. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna

b. Makna kewajiban asasi manusia

Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal I ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimana pun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

2. Subtansi Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila

a. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila

Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

b. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.

c. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

A. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas.

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

1. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, di antaranya sebagai berikut.
 - a. sikap egois
 - b. rendahnya kesadaran
 - c. sikap tidak toleran
2. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut
 - a. Penyalahgunaan kekuasaan
 - b. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
 - c. penyalahgunaan teknologi
 - d. kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

B. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran- pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Upaya penegakan hak asasi manusia (HAM)

A. Upaya pemerintah dalam menegakkan Ham

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut.

1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian,

penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
- b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
- c. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
- d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar

2. Pembentukan instrumen HAM

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM.

3. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat.

Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

B. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM:

- a) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya
- c) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
- d) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi)

2. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya, sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang.

B. Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila

1. Hakikat Demokrasi

A. Makna Demokrasi

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau

memutuskan berbagai hal yang menyangkat kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara

B. Klasifikasi Demokrasi

Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk.

Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi.

a. Berdasarkan titik berat perhatiannya

Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk..

- 1) Demokrasi formal
- 2) Demokrasi materia
- 3) Demokrasi gabungan

b. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

- 1) Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal
- 2) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar

c. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

- 1). Demokrasi langsung
- 2). Demokrasi tidak langsung

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya

Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
- e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
- f. menjamin tegaknya keadilan

2. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila

a. Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan "musyawarah mufakat" dan "gotong royong" dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya.

Apa sebenarnya Demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya (bulat dan utuh). Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan prinsip Demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi dengan kecerdasan
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
4. Demokrasi dengan rule of law
5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara
6. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
7. Demokrasi dengan otonomi daerah
8. Demokrasi dengan kemakmuran
9. Demokrasi yang berkeadilan sosial

b. Periodisasi Perkembangan Demokrasi Pancasila

Pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan apakah benar negara kita adalah negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sudut pandang normatif dan empirik. Dalam sudut

pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Apakah secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi?

Jawabannya tentu saja sudah. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi.

1. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi quasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.

Pada periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional membahayakan persatuan dan kesatuan nasional

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Harapan tersebut tentu saja ada dasarnya. Orde Baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998 - sekarang

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto (meskipun kembali terpilih dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998) terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar

maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun Presiden Soeharto menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle (perombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain, kecuali mundur dari jabatannya.

3. Membangun Kehidupan Yang Demokratis Di Indonesia

A. Pentingnya Kehidupan yang Demokratis

Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan

demokratis itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahami uraian materi berikut ini.

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan makna masing-masing.

1. Persamaan kedudukan di muka hukum Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di

muka umum maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.

3. Distribusi pendapatan secara adil Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh

penghasilan. Dengan program- program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia.

4. Kebebasan yang bertanggung jawab Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Empat kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain.

Setelah kalian memahami karakteristik negara yang demokratis, coba kalian bayangkan jika kalian tidak diperlakukan sama di depan hukum. Kalian tentunya merasa diperlakukan tidak adil dan kepercayaan kalian terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun atau bahkan tidak ada. Bayangkan pula apabila anggota masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Pengangguran akan semakin meningkat serta fakir miskin bertambah banyak jumlahnya dan mereka semakin terlantar kehidupannya.

Demikian pula halnya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang kalian rasakan seandainya kalian tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua kalian. Segala aturan keluarga harus kalian ikuti tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jika di kelas kalian, guru tidak memberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi

e. Metode Pembelajaran

1) Pendekatan : Saintifik

2) Model : Model Pembelajaran Inkuiri

3) Metode : Tanya jawab, diskusi

f. Media Pembelajaran

Media :

- Media cetak : buku paket
- Media audio visual : -
- Watshapp group

Alat/Bahan :

- Alat : Laptop, Jaringan internet
- Bahan ajar berbasiskan cetak : buku guru dan buku pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
- Bahan ajar berbasiskan teknologi : -

c. Sumber Belajar

1. Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2017

d. Kegiatan Pembelajaran

Rincian Kegiatan	Waktu
Pendahuluan 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis, serta sumber belajar. 2. Guru melakukan motivasi dalam belajar • Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 3. Membacakan tujuan pembelajaran	10 menit
Kegiatan Inti: Mengamati • Membaca dari buku ppkn tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Harmonisasi hak dan kewaiban asasi manusia dalam perspektif pancasila dan Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila • Guru menjelaskan materi secara garis besar dengan bantuan media pembelajaran • Siswa mengamati penjelasan guru dan media yang di bawakan oleh guru	60 menit
Menanya	

4. Peserta didik diminta untuk bertanya atau berpendapat terkait materi yang telah disampaikan oleh guru

Mencoba/mengeksplorasi

- Peserta didik mencari informasi dari berbagai literasi mengenai materi tentang Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila dan Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila

Menalar/mengasosiasi

- Guru membagi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi tentang materi Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila dan Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila
- Peserta didik mendiskusikan pengetahuan yang di dapatkan tentang Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila dan Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila

Mengkomunikasikan

- Peserta didik secara kelompok menyusun analisis dan kesimpulan dalam sebuah laporan hasil telaah untuk presentasi
- Peserta didik secara kelompok menyajikan hasil telaah di depan kelas secara bergantian, dan dilanjutkan tanya jawab dengan kelompok lain
- Kegiatan penyajian setiap kelompok secara bergantian di depan kelas.

Penutup

10 menit

1. Peserta didik dan guru secara bersama melakukan refleksi pembelajaran seperti, menyimpulkan materi yang telah di sampaikan
2. Guru memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya
3. Peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam

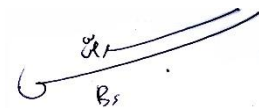
Guru Mata Pelajaran



Hendra kurniawan,S.Pd

Bangkalan, 16 September 2023

Mahasiswa PLP II



Badrus Soleh
NPM. 2023311007

Dokumentasi PLP II

